



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2019

Penyusun:

Penanggung Jawab: Ismed Saputra | Ketua Tim: Abdullah |
Editor: Arwin Fathurrakhman | Desain Grafis: Eko Siyam B. |
Anggota: Dagri Meifardo | Hermono | Yunisah | Rikki Okto S |

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU

DAFTAR ISI

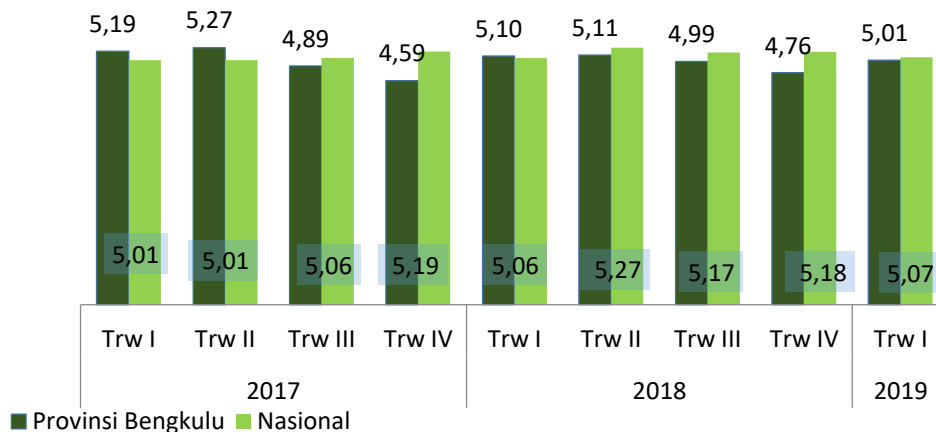
Daftar Isi	i
Bab I Perkembangan dan Analisis Regional	1
A Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B Inflasi	2
C Indikator Kesejahteraan	3
Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	6
A Pendapatan Negara	7
B Belanja Negara	9
C Prognosis Realisasi APBN	12
Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	13
A Pendapatan Daerah	14
B Belanja Daerah	17
C Prognosis Realisasi APBD	18
Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)	19
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	19
B Pendapatan Konsolidasian	19
C Belanja Konsolidasian	21
D Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto....	22
Bab V Berita/Isu Fiskal Regional	24
A Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendorong Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Bengkulu	24
B Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Bengkulu	24

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Bengkulu yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp17,50 triliun. Sedangkan nilai riil PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp11,37 triliun. Laju pertumbuhan PDRB pada Triwulan I Tahun 2019 tumbuh 5,01 persen (y-on-y) mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada periode Triwulan I 2018 (5,10 persen). Secara nasional, pertumbuhan Provinsi Bengkulu tercatat lebih rendah dari angka nasional (5,07 persen) namun berada di atas laju rata-rata pertumbuhan regional Sumatera.

Grafik I.1. Pertumbuhan PDRB Prov. Bengkulu (y-on-y)
(Dlm Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2019 terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi LNPRT sebesar 11,53 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 8,68 persenan konsumsi pemerintah sebesar 5,73 persen. Konsumsi LNPRT mampu tumbuh tinggi disebabkan oleh kegiatan Pemilu serentak yang mampu menggerakkan sektor perekonomian masyarakat dalam pembuatan alat-alat peraga kampanye.

Sementara dari sisi lapangan usaha pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha jasa keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,91 persen. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,80 persen, diikuti jasa

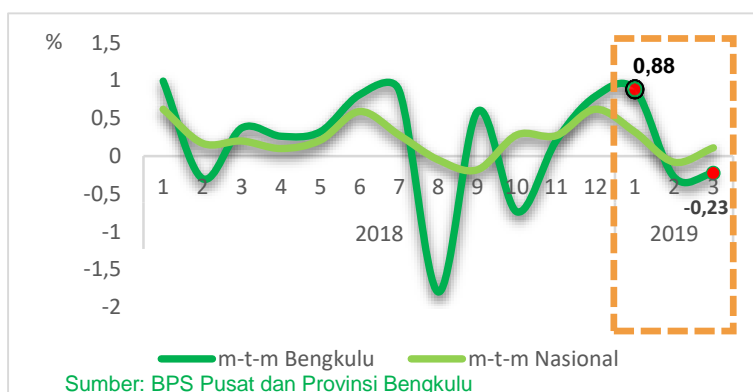
kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,77 persen. Bertumbuhnya tempat-tempat kuliner baru dan pesatnya penambahan perhotelan menjadi penyebab lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mampu tumbuh tinggi.

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2019 Provinsi Bengkulu mempunyai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,20 persen, sementara realisasi triwulan I sebesar 5,01 persen atau dibawah target. Artinya sampai dengan triwulan I masih dibawah target sebesar 0,19 persen.

B. Inflasi

Laju Inflasi tahunan (y-on-y) pada Triwulan I 2019 sebesar 1,65 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang sebesar 3,40 persen. Sedangkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan (inflasi tahun kalender (y-t-d) sebesar 0,36 persen). Angka ini sedikit berada di atas inflasi nasional yaitu 0,99 persen.

Grafik I.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (m-t-m)



Kenaikan harga secara umum pada bulan Januari 2019 tercatat sebesar 0,88 persen (berada di atas inflasi nasional yaitu 0,32 persen). Angka inflasi ini disebabkan naiknya harga kelompok pengeluaran

kesehatan sebesar 3,90 persen terutama dipicu oleh kenaikan tarif rumah sakit, diikuti kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,95 persen terutama disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara. Selanjutnya, inflasi bulan Januari 2019 disebabkan kenaikan kelompok pengeluaran bahan makanan, sebesar 0,86 persen. Kelompok pengeluaran ini menyumbang inflasi sebesar 0,20 persen. Selain terjadi inflasi, pada kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dipengaruhi dengan turunnya harga beberapa komoditas antara lain cabe merah, bensin dan minyak goreng.

Perkembangan harga pada bulan Februari 2019 tercatat mengalami deflasi sebesar sebesar -0,28 persen (secara nasional tercatat deflasi sebesar -0,08 persen). Angka deflasi ini disebabkan penurunan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar -1,53 persen diikuti kelompok pengeluaran kesehatan sebesar -0,19 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,01 persen. Komoditas yang mengalami deflasi antara lain turunnya harga daging ayam ras, cabai merah dan minyak goreng.

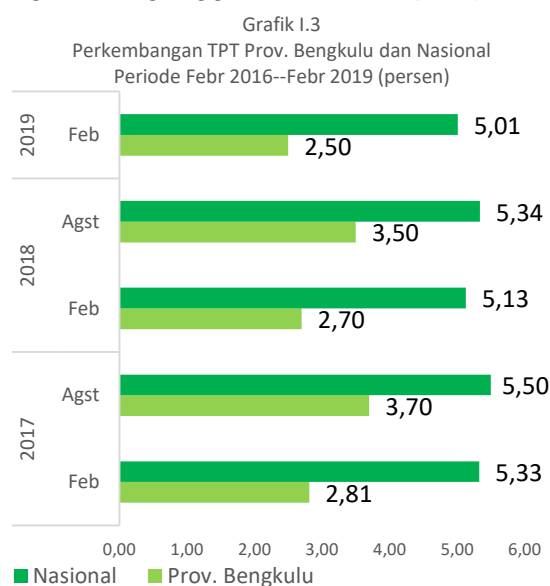
Sedangkan pada bulan Maret 2019 tercatat terjadi deflasi sebesar -0,23 persen (sedangkan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,11 persen). Deflasi terutama disebabkan penurunan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,88 persen dan kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar -0,01 persen. Deflasi yang terjadi pada bulan ini terutama disebabkan oleh antara lain turunnya tarif angkutan udara, harga beras dan harga cabai merah.

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus melakukan langkah antisipatif dengan penekanan kebijakan pengendalian produksi dalam upaya menyangga kebutuhan masyarakat Bengkulu dengan menjalin kerjasama antar daerah dengan Pemda diluar Bengkulu untuk pemenuhan pasokan komoditas daging sapi, daging ayam ras, telur dan benih ikan. Beberapa rekomendasi yang diberikan kepada TPID antara lain: melakukan pengendalian inflasi yang difokuskan pada komoditas yang memiliki frekuensi dan andil yang besar terhadap inflasi seperti Angkutan udara untuk memastikan pasokan armada penerbangan mencukupi kebutuhan pada masa-masamenghadapi bulan puasa dan menghadapi lebaran.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu rilis BPS terakhir pada

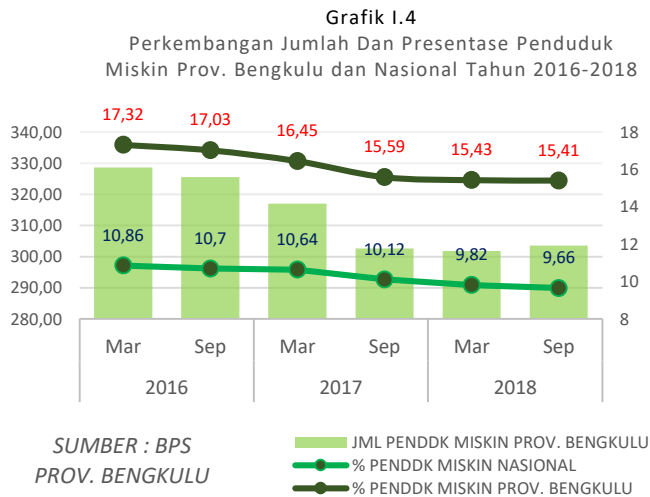


Februari 2019 mencapai 2,50 persen, angka tersebut masih dibawah angka TPT Nasional (5,01 persen). Ini artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 2 sampai 3 orang pengangguran. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan Februari 2018. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat SD kebawah

sebanyak 38,61 persen dan tamat SMP sebanyak 17,36 persen sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 10,40 persen

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada periode 2016-2018 di Provinsi Bengkulu menunjukkan



trend menurun dari waktu ke waktu selama periode Maret 2016 sampai dengan September 2018. Apabila dibandingkan antara periode September 2018 yang tingkat kemiskinannya sebesar 15,41 persen ke September 2017 yang tingkat kemiskinannya 15,59 persen, terjadi penurunan persentase

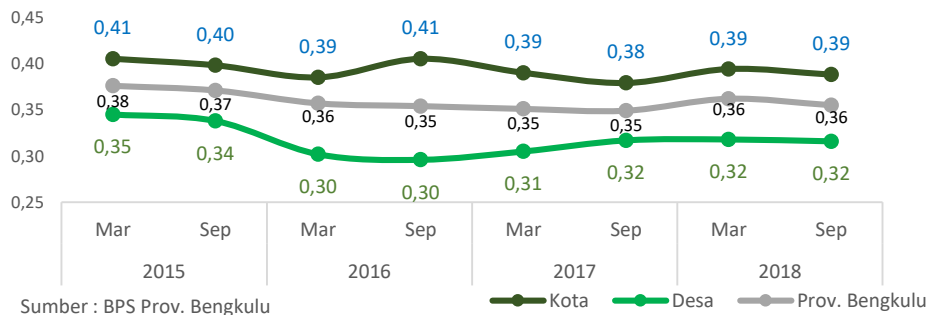
kemiskinan sebesar 0,18 persen. Pada periode September 2016 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 325,60 ribu jiwa (15,59 persen) terus menurun hingga menjadi 303,55 ribu jiwa (15,41 persen) di bulan September 2018.

Bila dibandingkan dengan nasional, kemiskinan di Provinsi Bengkulu sangat tertinggal jauh. Pada September 2018 tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 15,41 persen, lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 9,66 persen. Penyebab tingginya kemiskinan di Provinsi Bengkulu antara lain karena Perekonomian Bengkulu masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong utama serta infrastruktur yang belum memadai.

3. Gini Ratio

Gini Ratio Provinsi Bengkulu periode September 2018 tercatat 0,355 atau meningkat 0,001 poin dibandingkan September 2017 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di wilayah Maluku lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional.

Grafik I.5
Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal Maret 2013-Sept 2017



Progress Perkembangan Indikator Makro Provinsi Bengkulu s.d Triwulan I 2019

Tabel I.1 Realisasi Indikator Makro Provinsi Bengkulu dan Nasional s.d Triwulan I Tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi
		(KUA Prov. Bengkulu TA 2019)	Prov. Bengkulu	Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	5,01%	5,07%
2	Inflasi	4,36%	1,65% *	3,4% *
3	Kemiskinan	14,40%	15,41% **	9,66% **
4	Pengangguran (TPT)	3,21%	2,50%	5,01%

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam tiap-tiap indikator kesejahteraan yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Dalam usaha untuk peningkatan PDRB, Pemerintah Daerah harus memfokuskan kebijakan fiskalnya kepada sektor pertanian dan perkebunan
2. Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi sektor pariwisata dengan membangun dukungan sarana dan prasarana pariwisata, mengembangkan wisata kuliner yang menjadi kekhasan daerah
3. Segera mempercepat realisasi dana APBN dan APBD utamanya belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti dana desa, bantuan sosial dan proyek-proyek infrastruktur.

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Data Pelaksanaan APBN di Provinsi Bengkulu Pada Triwulan I Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	2.605,85	434,97	2.574,36	423,34
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.605,85	434,97	2.574,36	423,34
1. Penerimaan Pajak	2.030,00	320,76	2.253,18	294,28
2. PNBP	575,85	114,21	321,18	129,06
II. HIBAH	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	14.020,08	2.754,43	15.280,79	3.325,57
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	4.490,26	581,56	4.490,25	598,58
1. Belanja Pegawai	1.530,22	301,57	1.537,42	329,04
2. Belanja Barang	1.824,43	213,52	2.005,01	252,42
3. Belanja Modal	1.121,42	66,47	932,87	14,81
4. Belanja Bantuan Sosial	14,19	0,00	14,95	2,31
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	9.529,82	2.172,87	10.790,54	2.726,99
1. Transfer ke Daerah	8.583,43	2.037,16	9.711,12	2.533,28
a. Dana Perimbangan	8.583,43	2.037,16	9.664,94	2.533,28
1) Dana Alokasi Umum	6.412,41	1.791,26	6.666,97	2.202,13
2) Dana Bagi Hasil	292,87	41,45	339,43	53,19
3) Dana Alokasi Khusus	1.878,15	204,45	2.658,54	254,88
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	36	-	46,18	23,09
2. Dana Desa	946,39	135,71	1.079,42	193,71
C. SURPLUS DEFISIT	(11.414,23)	(2.319,46)	(12.706,43)	(2.902,23)

Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

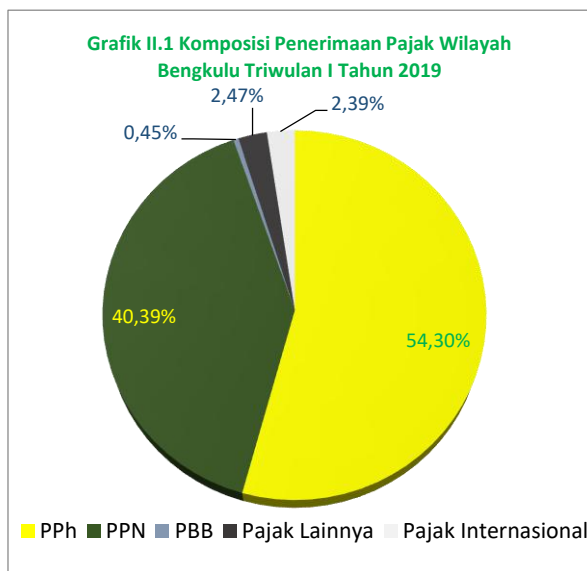
Dari tabel II.1 Realisasi pendapatan Negara di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 mencapai Rp423,34 milyar turun 8,26% dibanding periode yang sama Tahun 2018 dengan realisasi Rp434,97 milyar. Realisasi belanja Triwulan I Tahun

2019 sebesar Rp3.326,57 milyar meningkat 11,39% dibandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2018 dengan realisasi Rp2.986.32 milyar.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

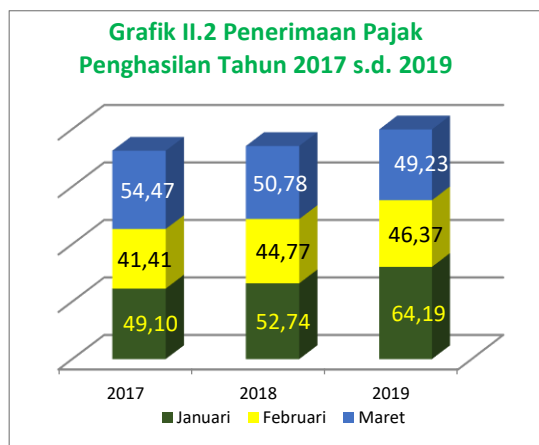


sebesar Rp294,28 milyar. Apabila dibandingkan dengan periode sampai dengan Triwulan I tahun 2018, dimana realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp320,76 milyar, maka terdapat penurunan sebesar Rp26,48 milyar. Penerimaan PPh dan penerimaan PPN masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan, 94,69% dari seluruh penerimaan perpajakan merupakan penerimaan PPh dan PPN.

Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi penerimaan PPh pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp159,79 milyar tumbuh 7,76% atau sebesar 11,5 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Pajak Penghasilan menjadi contributor terbesar dari penerimaan perpajakan dengan kontribusi 54,30% dari total penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu. Penerimaan Pajak Penghasilan terbesar yaitu KPP Pratama Bengkulu.

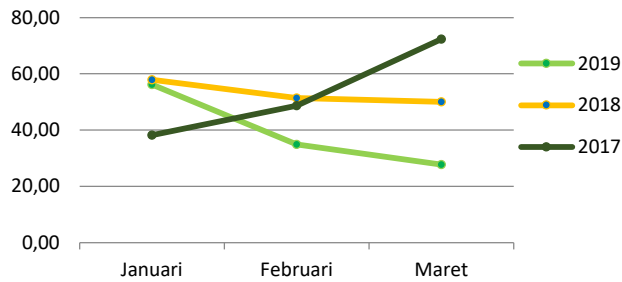


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Realisasi PPN pada Triwulan I Tahun 2019 mencapai Rp118,87 milyar mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun 25,40% dibanding Triwulan I Tahun 2018 yang mencatat realisasi sebesar Rp159,33 milyar. Penurunan penerimaan PPN ini salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan terkait percepatan restitusi pajak

Grafik II.3 Perbandingan Penerimaan PPN Tahun 2017 s.d. 2019 (dalam miliar Rp)



(<https://katadata.co.id/berita/2019/02/21/restitusi-dipercepat-penerimaan-ppn-januari-tumbuh-negatif-92>)

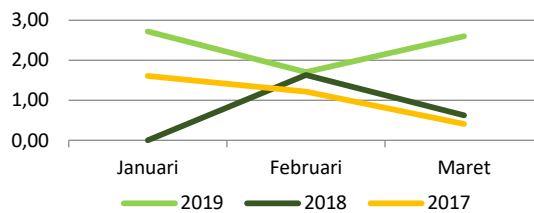
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

c) Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari pendapatan Bea Masuk, Bea Keluar serta Cukai. Namun selama tahun 2017 s.d. 2019 tidak ada pendapatan cukai di wilayah Provinsi Bengkulu.

Penerimaan Bea Masuk pada Triwulan I Tahun 2019 mencapai Rp2,36 milyar meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp22,98 juta. Sedangkan penerimaan Bea Keluar pada akhir Triwulan I Tahun 2019 mencapai Rp4,67miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2,24 milyar dibandingkan periode yang sama Tahun 2018.

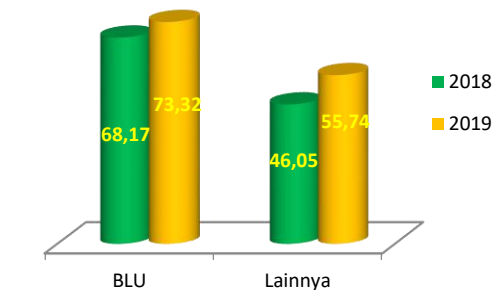
Grafik II.4 Perbandingan Pajak Internasioani Tahun 2017 s.d. 2019 (dalam miliar Rp)



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik II. 5 Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2018 s.d. 2019 di Wilayah Provinsi Bengkulu



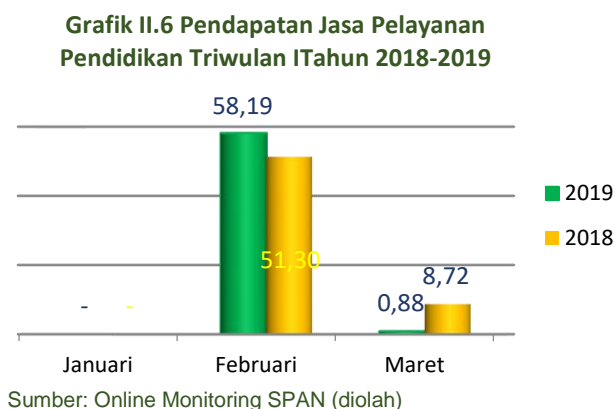
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi PNBP di Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah sebesar Rp129,06 milyar Apabila dibandingkan dengan periode akhir Triwulan I Tahun 2018, dimana realisasi PNBP sebesar Rp114,21 miliar, maka terjadi peningkatan sebesar Rp14,85 miliar. PNBP Lainnya mencapai Rp55,74 milyar dan PNBP BLU sebesar Rp73,32 milyar.

Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2019 yang terbesar disumbangkan dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dengan pendapatan sebesar Rp59,07 milyar atau berkontribusi sebesar 46% dari total pendapatan PNBP. Selanjutnya pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu menjadi penyumbang PNBP terbesar kedua di Bengkulu dengan nilai Rp20,15 milyar atau berkontribusi sebesar 16% dari total PNBP di Provinsi Bengkulu.

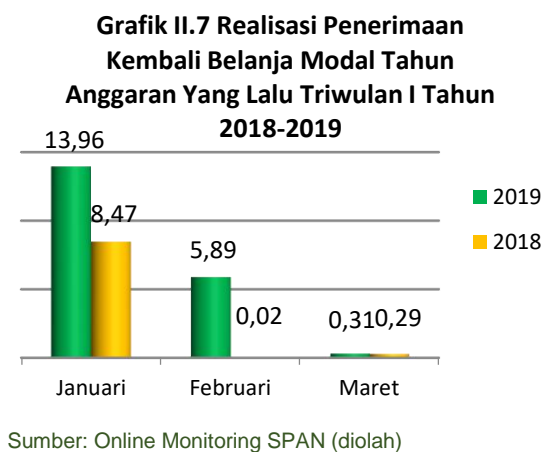
a) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Realisasi dalam Triwulan I 2019 sebesar Rp59,72 milyar. Menurun tipis dibandingkan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp60,02 milyar. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan bersumber dari Satuan Kerja Universitas Bengkulu dan Politeknik Kesehatan Bengkulu.



b) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pada Triwulan I Tahun 2019 tercatat sebesar Rp20,15 Milyar. Namun perlu diingat bahwa Penerimaan Kembali Belanja bukan merupakan bentuk pendapatan karena bukan merupakan dari kegiatan operasional serta keterjadiannya tidak setiap tahun terjadi.



B. Belanja Negara

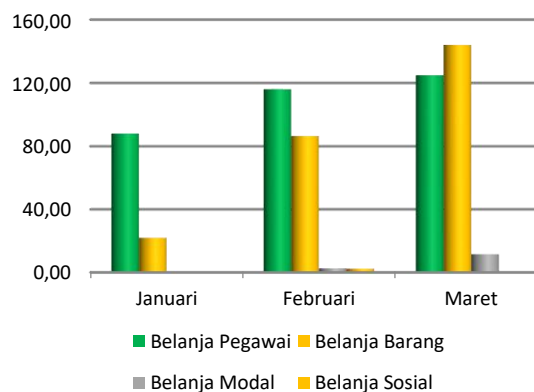
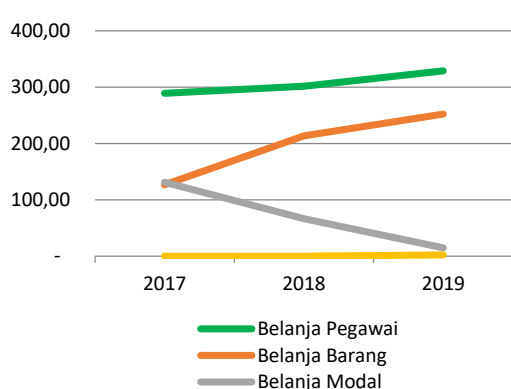
Alokasi belanja negara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 15,28 triliun. Sebagian besar dari Belanja Negara tersebut yaitu sebesar Rp10,79 triliun atau 72,55 persen dari total Belanja Negara berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4,49 triliun atau sekitar 27,45 persen dari total Belanja Negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat

dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah Provinsi Bengkulu. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan hasilnya segera bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Triwulan I Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2018. Realisasi Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp598,58 milyar naik sebesar 17,02 milyar dibandingkan tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp581,56 (naik 2,93 persen).

Grafik II.8 Tren Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Bengkulu

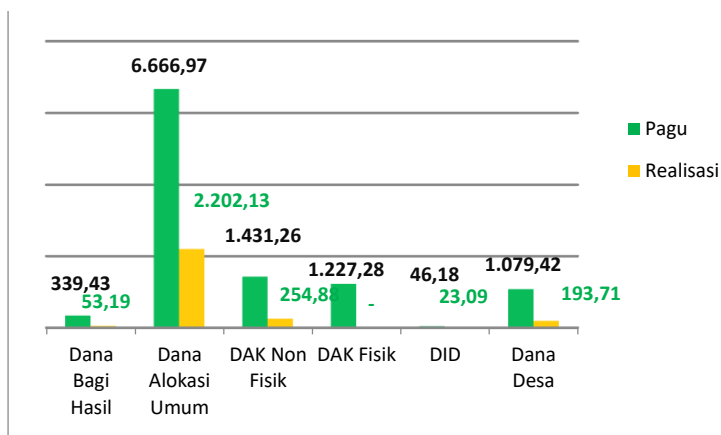


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Berdasarkan grafik II.10 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Sosial menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Belanja Pegawai pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat 9,11% dibandingkan tahun sebelumnya (dari 301,57 milyar menjadi 329,04 milyar). Realisasi Belanja Barang meningkat dari 213,52 milyar pada Tahun 2018 menjadi 252,42 pada Tahun 2019 (meningkat 18,22%). Serta Belanja Bantuan Sosial meningkat dari tidak ada realisasi pada Triwulan I Tahun 2018 menjadi 2,31 milyar di periode yang sama pada Tahun 2019. Realisasi belanja yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu Belanja Modal, pada Triwulan I Tahun 2018 realisasinya mencapai 66,47 milyar menurun menjadi 14,81 milyar di Periode yang sama Tahun 2019. Bila dilihat tren per bulan selama tahun 2019 realisasi semua jenis belanja memiliki tren naik dibanding bulan sebelumnya.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

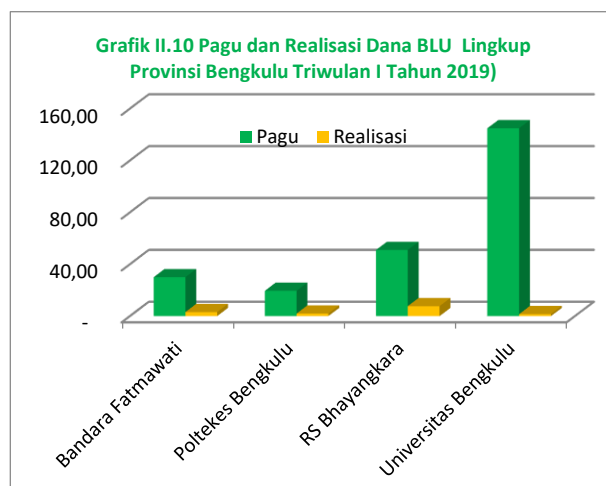
Grafik II.9 Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Akhir Triwulan I Tahun 2019



Realisasi TKDD Provinsi Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp10,79 triliun. Penyaluran terbesar pada Triwulan I Tahun 2019 yaitu penyaluran Dana Insentif Daerah yang telah terealisasi sebesar 50% (Rp23,09 milyar), diikuti oleh DAU sebesar 33,03% (Rp2.202,13), Dana Desa

sebesar 17,95% (Rp193,71 milyar, DAK Non Fisik sebesar 17,81% (Rp254,88 milyar) dan Dana Bagi Hasil sebesar 15,67% (Rp53,19 milyar). Untuk DAK Fisik, selama Triwulan I 2019 belum ada realisasi yang masuk, dikarenakan pencairan DAK Fisik diwujudkan paling lambat bulan Juli.2019

3. Pengelolaan BLU



Di wilayah Bengkulu terdapat 4 satker BLU, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu BLU dari keempat satker tersebut adalah sebesar Rp245,41 miliar. Sedangkan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2019 adalah sebesar Rp14,29 miliar.

4. Manajemen Investasi Pusat

Data Penyaluran KUR sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 per Bank/Penyyalur lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Penyaluran KUR per Bank/Penyalar Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan I Tahun 2019 (dalam Rp)

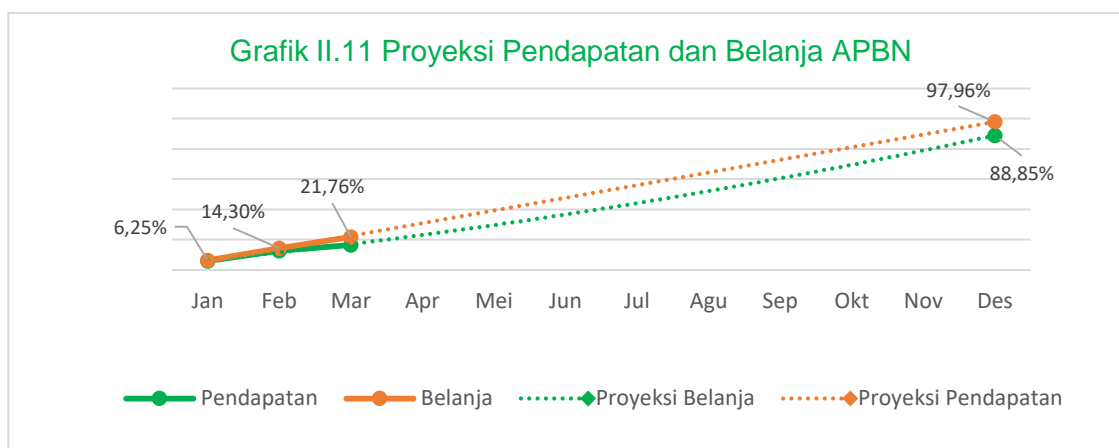
No.	Bank/Penyalar	Jumlah Debitur	Nilai Penyaluran
1	BRI	10.655	253.862.140.000
2	Bank Mandiri	995	91.694.000.000
3	BRI Syariah	172	16.945.000.000
4	BPD Bengkulu	75	11.885.000.000
5	BNI	56	16.483.150.800
6	BPD Sumbar	3	1.200.000.000
7	Penyalur Lainnya	23	441.905.000
Total Penyaluran		11.979	392.511.195.800

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019, KUR yang telah tersalur di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp392,51 milyar rupiah, yang disalurkan kepada 11.979 debitur. Sebagian besar disalurkan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp253,86 miliar kepada 10.655 debitur.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun 2019 dalam lingkup Provinsi Bengkulu dengan mempertimbangkan pola realisasi triwulan diperkirakan mencapai 88,85% untuk pendapatan Negara dan 97,96% untuk belanja Negara.



BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Wilayah Bengkulu terdiri atas sebelas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Uraian	2018		2019	
	Pagu	Realisasi	pagu	Realisasi
Pendapatan	11.859,61	2.664,97	13.148,05	2.843,47
PAD	1.752,81	357,69	1.942,21	234,95
Pendapatan Pajak Daerah	871,10	136,66	1.039,38	161,66
Pendapatan Retribusi	58,43	6,89	48,64	6,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	54,49	12,29	58,15	0,60
Lain-Lain PAD yang sah	768,80	201,84	796,04	66,11
Pendapatan Transfer	9.917,88	2.281,02	11.075,97	2.597,40
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	8.783,24	1.989,16	9.668,18	2.416,27
Dana Bagi Hasil Pajak	276,37	31,19	320,69	50,61
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	6.420,21	1.856,30	6.666,97	2.117,04
Dana Alokasi Khusus	2.086,66	101,67	2.680,52	248,62
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	852,43	268,87	1.118,68	168,88
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	852,43	268,87	1.118,68	168,88
Transfer Pemerintah Provinsi	279,13	22,99	279,11	12,25
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	273,98	22,99	279,11	12,25
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5,15	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	3,08	-	10,00	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov/Kab/Kota Lainnya	3,08	-	10,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	188,92	26,26	129,87	11,12
Pendapatan Hibah	55,94	0,27	128,81	0,09
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
pendapatan Lainnya	132,98	25,99	1,07	11,03
Jumlah Pendapatan	11.859,61	2.664,97	13.148,05	2.843,47
Belanja	10.888,26	1.011,59	12.076,94	1.101,37
Belanja Pegawai	5.099,67	762,87	5.361,52	865,54
Belanja Barang	3.057,52	139,70	3.064,38	185,47
Belanja Bunga	-	-	4,00	-
Belanja Subsidi	0,20	-	-	-
Belanja Hibah	437,01	87,28	476,37	21,00
Belanja Sosial	13,16	-	16,43	0,29
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	21,43	-
Belanja Modal	2.266,38	21,74	3.115,81	29,06
Belanja Tak Terduga	14,33	-	17,00	0,02
Transfer Pemerintah Daerah	1.681,05	194,11	1.865,58	71,12
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	279,89	0,03	261,18	16,38
Transfer bagi Hasil Pajak Daerah	279,89	0,03	261,18	16,38
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Transfer bantuan Keuangan	1.401,16	194,08	1.604,39	54,74
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya	-	-	-	-
Transfer bantuan Keuangan ke Desa	1.399,29	194,08	1.604,39	54,74
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,87	-	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	12.569,31	1.205,70	13.942,52	1.172,49
Surplus/Defisit	(709,70)	1.459,27	(794,47)	1.670,98

(dalam miliar Rp)

Sumber: SIKD (diolah)

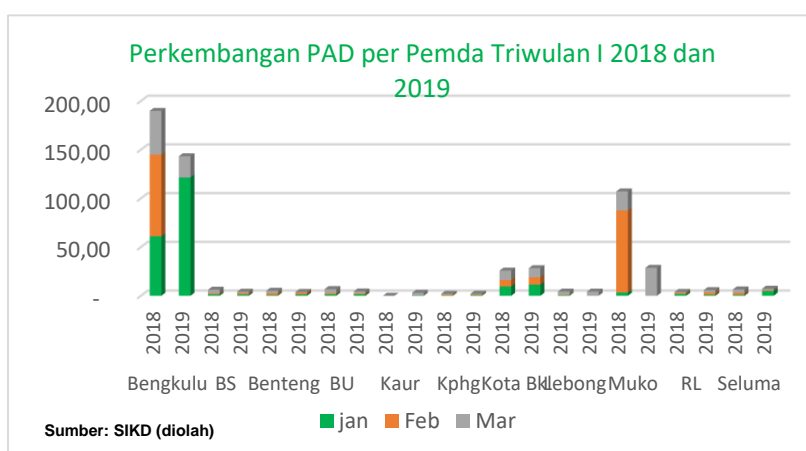
Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp2,84 triliun, tumbuh 6,70% dari triwulan I 2018 yang sebesar Rp2,66 triliun. Tumbuhnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh pendapatan transfer yang mampu

tumbuh 13,87% sementara Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 34,31%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan 57,64%.

Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp1,17 triliun mengalami penurunan sebesar 2,75% dibandingkan dengan triwulan I 2018 yang sebesar Rp1,20 triliun. Penurunan realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh Belanja Daerah yang meningkat 8,88% dan Transfer Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan sebesar 63,36%.

A. Pendapatan Daerah

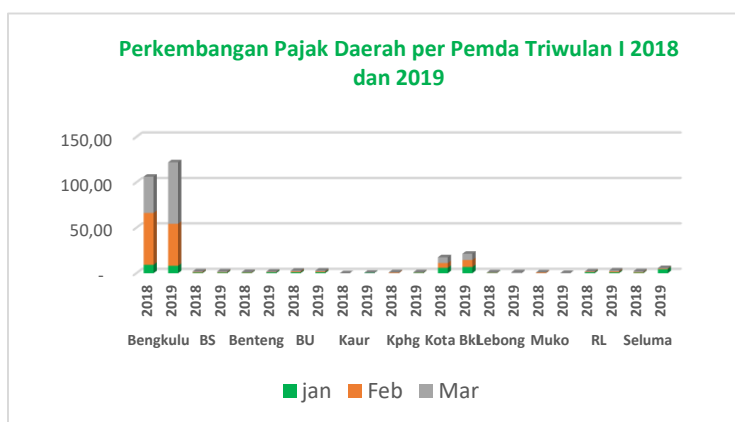
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Secara agregat PAD Pemda lingkup Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp234,95 miliar atau 21,63% dari pagu. Realisasi ini mengalami penurunan

sebesar 34,31% dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar Rp357,69 miliar. Realisasi PAD dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang mampu tumbuh 18,29%. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan 4,44%, Hasil Kakayaan Daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan 95,12% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan 67,25%.

a) Penerimaan Pajak Daerah



Agregat pajak daerah seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp161,66 miliar atau 15,55% dari pagu, tumbuh 18,29% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2018. Peningkatan

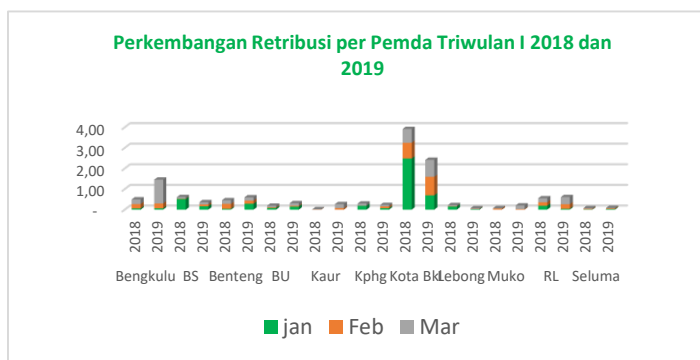
pajak daerah ini disumbangkan oleh 8 Pemda yang mengalami kenaikan, dan 3 Pemda

yang mengalami penurunan yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko.

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran menjadi sumber pendapatan pada triwulan I tahun 2019. Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan ini mengindikasikan semakin baiknya tingkat ketepatan waktu pembayaran tagihan PLN oleh masyarakat, dimana PPJ ini dipungut sebesar 10% dari konsumsi listrik masyarakat. Kenaikan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran disebabkan adanya usaha pemerintah Kota Bengkulu melakukan ekstensifikasi pajak kepada restoran-restoran yang belum dikenakan pajak di wilayah Kota Bengkulu.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

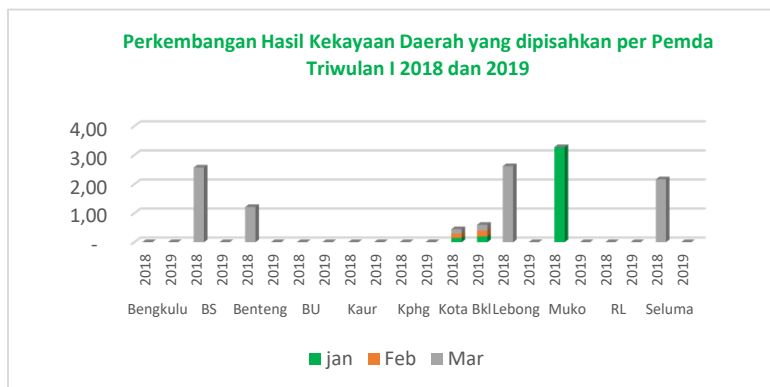
Agregat penerimaan retribusi seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I 2019 sebesar Rp6,58 miliar atau 13,53% dari pagu, mengalami penurunan 4,44% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2018. Penurunan retribusi daerah ini dipengaruhi oleh 6 Pemda yang mengalami kenaikan dan 5 Pemda yang mengalami penurunan.



Secara agregat, retribusi jasa umum (Retribusi sewa tanah dan bangunan, dan retribusi rekreasi) menjadi penyumbang penurunan pada triwulan I tahun 2019. Khusus di Kota Bengkulu Retribusi pada triwulan I 2019 mengalami

penurunan hingga 51,23%, hal ini disebabkan karena retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang mengalami penurunan signifikan.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan



Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp600 juta atau 1,03% dari pagu, mengalami penurunan

95,12% dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar Rp12,29 miliar.

Penurunan hasil kekayaan dipisahkan ini dikarenakan sepanjang triwulan I 2019 penerimaan hanya terjadi di Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp600 juta yang berasal dari pembagian laba PDAM kota Bengkulu.

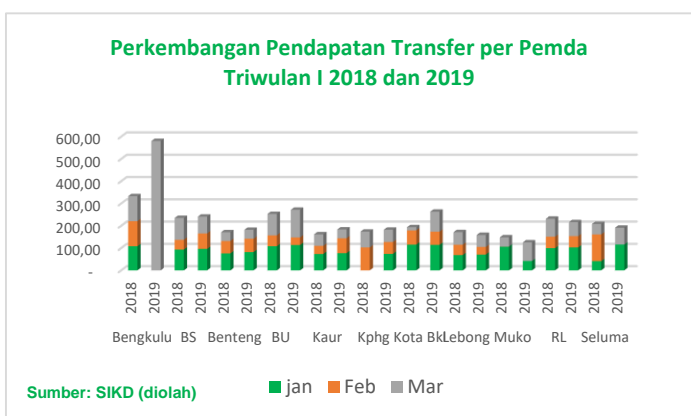


Kemandirian fiskal tercermin dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Pemda di Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar 7,63% atau turun dari triwulan I 2018 yang sebesar 11,83%.

Rendahnya PAD dikarenakan Pemda di Bengkulu belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD-nya. Kekayaan yang melimpah di Bengkulu tidak menjamin PAD yang diterima menjadi lebih baik. Infrastruktur yang masih kurang dan perizinan diduga menjadi salah satu penyebab investor tidak mau menanamkan modalnya di Bengkulu.

2. Pendapatan Transfer

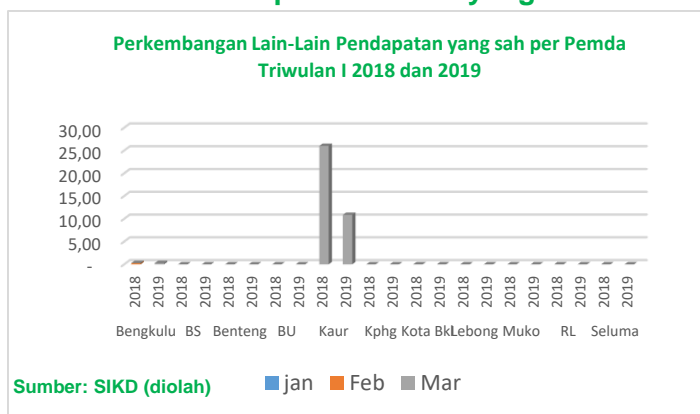
Total pendapatan transfer pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp2,59 triliun atau 23,45% tumbuh 13,87% dari Triwulan I 2018. Pendapatan transfer disumbangkan oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp2,41 triliun, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp168,88 miliar, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp12,25 miliar.



Apabila dilihat dari 11 (sebelas) Pemerintah Daerah, 7 Pemda mengalami peningkatan dan 4 Pemda lainnya mengalami penurunan. Sebanyak 7 Pemda yang mengalami peningkatan disebabkan oleh dana desa yang telah disalurkan yang mana besarnya pada tahun

2019 lebih besar dari tahun 2018. Sementara 4 Pemda yang mengalami penurunan dikarenakan belum disalurnkannya Dana desa atau DAK Non Fisik Tahap I karena belum memenuhi persyaratan penyaluran.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Secara agregat, realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I 2019 sebesar Rp11,12 miliar atau mengalami penurunan signifikan sebesar 57,64% dibandingkan triwulan I 2018 sebesar Rp26,26 miliar.

Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan jasa giro yang mengalami penurunan.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi Belanja pegawai pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp865,54 miliar atau 16,14% dari pagu. Realisasi ini meningkat 13,46% dari triwulan I 2018. Realisasi Belanja Barang sebesar



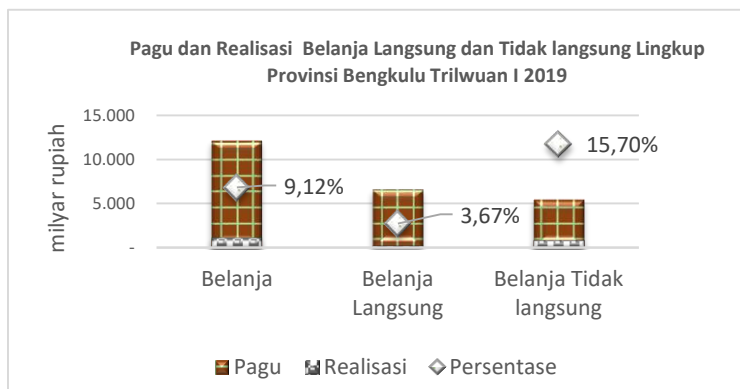
Rp185,47 miliar atau 6,05% dari pagu. Realisasi ini meningkat 32,77% dari triwulan I 2018. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp29,06 miliar atau 0,93% dari pagu. Realisasi ini meningkat 33,64% dari triwulan I 2018.

Meningkatnya Belanja Pegawai disumbang oleh pembayaran PNS baru. Meningkatnya Belanja Barang dikarenakan dampak dari persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Sementara itu, Naiknya Belanja Modal dipengaruhi oleh naiknya pagu DAK Fisik secara signifikan serta proses pengadaan barang dan jasa yang mulai direalisasikan.

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat dan berkoordinasi dengan aparat Pengawas internal (APIP) terutama untuk belanja modal yang menggunakan pembiayaan dari DAK Fisik.
2. Melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan e-katalog untuk memudahkan proses pengadaan dan memberikan rasa aman bagi pejabat pengadaan.

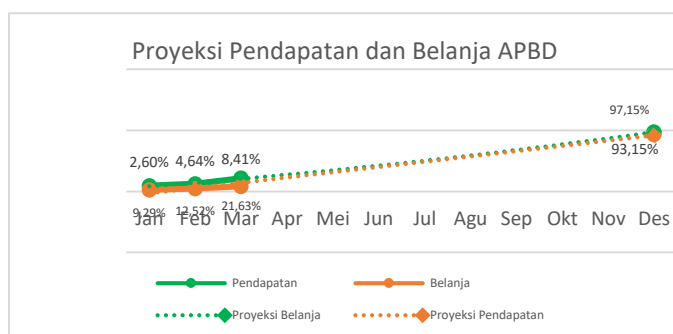
2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung



Realisasi total Belanja pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 sebesar Rp1,10 triliun atau 9,12% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp242,03 miliar atau 3,67%

dari pagu dan Belanja tidak langsung sebesar Rp859,34 miliar atau 15,70% dari pagu. Dengan melihat realisasi tersebut, belanja tidak langsung lebih dominan daripada belanja langsung. Dominannya belanja tidak langsung disebabkan karena belanja digunakan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor. Sedangkan realisasi belanja langsung masih rendah karena masih dalam proses pengadaan terutama untuk belanja modal.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019



Agregat realisasi pendapatan APBD seluruh pemda di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir 2019 diperkirakan sebesar Rp12.773,33 miliar atau 97,15% dari target. Hal yang diperkirakan tidak mencapai target adalah PAD dan dana transfer.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d TW I		Perkiraan Realisasi s.d TW IV	
		Rp	% thd Pagu	Rp	% thd Pagu
Pendapatan Daerah	13.148,05	2.843,47	21,63%	12.773,33	97,15%
Belanja Daerah	13.942,52	1.172,49	8,41%	12.987,46	93,15%
Surplus/(defisit)	-794,47	1.670,98		-214,12	

Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp12.987,46 miliar atau 93,15% dari pagu. Penghematan alamiah dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa menyebabkan belanja modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan terjadi defisit sebesar Rp214,12 miliar.

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I 2019 sebesar Rp532,79 miliar meningkat 8,66% dibandingkan dengan triwulan I 2018 sebesar Rp490,31 miliar. Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2019 sebesar Rp1.771,07 miliar turun 0,91% dibandingkan dengan triwulan I 2018 yang sebesar Rp1,787,26 miliar. Meningkatnya pendapatan pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh tumbuhnya Transfer sebesar 60,71%. Sementara pendapatan perpajakan turun sebesar 1,86% dan pendapatan bukan pajak juga turun sebesar 41,14%. Sedangkan menurunnya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh meningkatnya Belanja Pemerintah sebesar 6,70% sementara belanja transfer yang mengalami penurunan sebesar 63,36%.

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2019			Kenaikan/ Penurunan	2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	416,31	2.843,47	532,79	8,66%	490,31
Pendapatan Perpajakan	287,25	161,66	448,91	-1,86%	457,42
Pendapatan Bukan Pajak	129,06	84,32	213,38	-41,14%	362,49
Hibah	-	0,09	0,09	-65,17%	0,27
Transfer	-	2.597,40	(129,59)	-60,71%	(329,87)
Belanja Negara	3.325,57	1.172,49	1.771,07	-0,91%	1.787,26
Belanja Pemerintah	598,58	1.101,37	1.699,95	6,70%	1.593,15
Transfer	2.726,99	71,12	71,12	-63,36%	194,11
Surplus/(defisit)	(2.909,26)	1.670,98	(1.238,28)	-4,52%	(1.296,95)
Pembiayaan		(2,85)	(2,85)	-104,72%	60,25
Penerimaan Pembiayaan Daerah		-	-	-100,00%	72,60
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		2,85	2,85	-76,95%	12,35
Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran	(2.909,26)	1.668,13	(1.241,13)	0,36%	(1.236,70)

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu

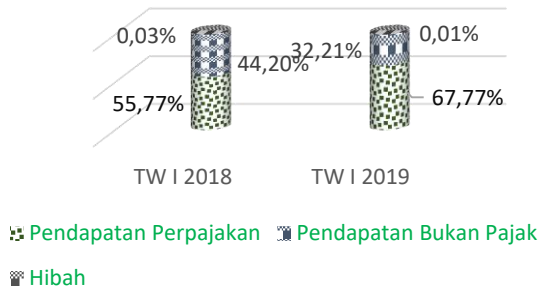
Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan I 2019 sebesar Rp2.726,99 miliar

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Dalam Pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, Porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 12% dari 55,77% pada triwulan I 2018 menjadi 67,77% pada triwulan I 2019. Peningkatan porsi pendapatan pajak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak yang lebih besar dari jenis pendapatan yang lainnya.

Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian



Porsi pendapatan bukan pajak mengalami penurunan sebesar 11,98% dari 44,20% pada triwulan I 2018 menjadi 32,21% pada triwulan I 2019. Penurunan porsi ini dikarenakan meningkatnya PNBPN yang lebih rendah dari meningkatnya

pendapatan pajak. Sementara untuk Porsi Hibah mengalami penurunan sebesar 0,02% dari 0,03% pada triwulan I 2018 menjadi 0,01% pada triwulan I 2019, hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan hibah pada triwulan I 2019 yang mencapai 65,17%.

Porsi Pendapatan Perpajakan yang semakin besar mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Bengkulu semakin membaik karena perpajakan merupakan sumber utama dari pendapatan. Diharapkan dengan naiknya porsi pendapatan perpajakan ini mampu meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bengkulu.

2. Analisis Perubahan

Perubahan Pendapatan Konsolidasian TW I 2018 ke TW I 2019



Pendapatan perpajakan pada triwulan I tahun 2019 turun 1,86% dibandingkan dengan triwulan I 2018. Hal ini oleh terutama dipengaruhi oleh PPN yang turun 34,05%. Sedangkan Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian juga mengalami

penurunan 41,14% dipengaruhi oleh menurunnya PNBPN pusat yang mencapai 10,53%. Turunnya pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak mengindikasikan perlu adanya upaya bagi petugas pajak dan penerima PNBPN untuk meningkatkan penerimaannya.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Menurut BPS Provinsi Bengkulu porsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu berkisar antara 17,59%. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis bahwa kenaikan/penurunan pendapatan akan berbanding lurus kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi.

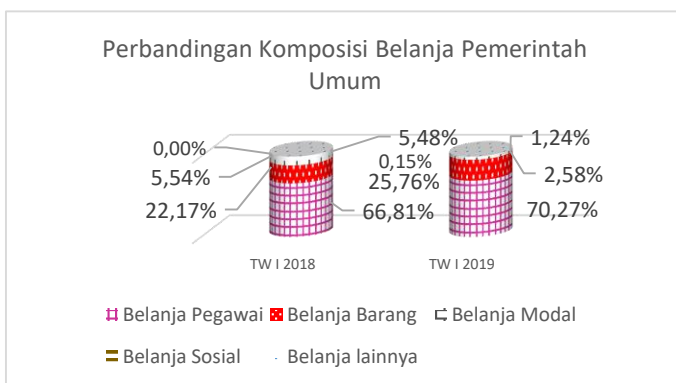
Uraian	Realisasi TW I 2018	Realisasi TW I 2019	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	457,42	448,91	-1,86%
PNBP	362,49	213,38	-41,14%
Total	819,92	662,29	-19,22%
PDRB/Pert Ekonomi	16.003,53	17.500,71	5,01%

Pada triwulan I 2019 Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu sebesar 5,01%. Pertumbuhan ini salah satunya disumbangkan oleh Konsumsi pemerintah yang mampu tumbuh 5,73%. Dari laporan konsolidasian diketahui bahwa penerimaan perpajakan mampu turun 1,86% dan PNBP turun 41,14%. Berdasarkan hal tersebut, potensi pajak dan PNBP untuk ditingkatkan masih ada terutama melalui PNBP Sumber Daya Alam khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

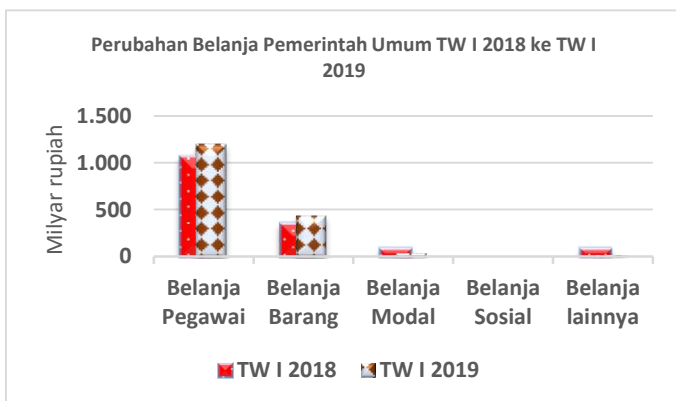
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada Triwulan I 2019 porsi belanja pegawai sebesar 70,27% mengalami peningkatan sebesar 3,46% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2018 yang sebesar 66,81%. Sementara porsi belanja barang meningkat 3,59% dari 22,17% menjadi 25,76%, sementara porsi Belanja modal mengalami penurunan sebesar 2,96% dari 5,48% menjadi 2,58%.



Kenaikan porsi belanja pegawai disebabkan karena pada triwulan I 2019 realisasi hanya didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang Sementara porsi belanja modal menurun disebabkan oleh penurunan belanja modal yang mencapai 50,27%.

2. Analisis Perubahan



Belanja Pemerintah Konsolidasian secara agregat pada triwulan I 2019 meningkat 8,88% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2018. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh Belanja pegawai yang mengalami kenaikan 13,46%, belanja barang

mengalami kenaikan 32,77% dan belanja modal mengalami kenaikan 33,64%, Kenaikan Belanja pegawai dan barang mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di Provinsi Bengkulu. Kenaikan Belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran gaji PNS baru. Naiknya Belanja barang disebabkan oleh persiapan pilkada serentak yang telah berlangsung pada April tahun 2019. Belanja modal mengalami peningkatan disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa yang mulai berjalan lebih cepat dari tahun 2018.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan I 2019 sebesar Rp889.182,- rupiah lebih rendah dari triwulan I 2018 sebesar Rp910.335,-. Semakin menurunnya rasio ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Bengkulu belum lebih cepat dari peningkatan belanja pemerintah. Hal ini disebabkan oleh akselerasi belanja pada triwulan I yang belum maksimal akibat masih prosesnya pengadaan barang dan jasa. Atas hal tersebut Pemerintah daerah segera mempercepat pengadaan barang dan jasa agar dapat meningkatkan belanja secara signifikan.


	TW I 2018	TW I 2019
Belanja Konsolidasian	1.787.261.449.267	1.771.073.752.460
Jumlah Penduduk Bengkulu	1.963.300	1.991.800
Rasio	910.335	889.182

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional, dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB.

	TW I 2019	PDRB s.d tw I	% atas PDRB
Revenue	452,78	17.500,71	2,59%
Expenses	1.780,06		10,17%
Gross operating balance	(1.327,28)		-7,58%
Net acquisition of non financial assets	43.87		0,24%
Net lending/borrowing	(1.371,15)		-7,83%

Net lending/borrowing terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sebesar -7,83%, Artinya pendapatan yang diterima di Bengkulu pada triwulan I 2019 belum mampu membiayai seluruh belanja. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak pusat yang belum mampu menutup belanja, sementara pendapatan daerah masih tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Ini mengindikasikan perekonomian di Bengkulu sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.



Apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus perbandingan dengan PDRB maka kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 2,59% menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Bengkulu menjadi stimulus fiskal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD yang proposional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

Perbandingan *net acquisition of financial asset* dibagi dengan PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pada triwulan I 2019 berkontribusi 0,24% terhadap PDRB. Rendahnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan I 2019 belanja modal masih rendah yang dikarenakan masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa.



BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL

A. PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDORONG SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung kepada transfer ke daerah. Hal ini disebabkan dari minimnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perpajakan dan untuk sektor Pengeluaran pun masih didominasi oleh Belanja Pegawai sedangkan untuk untuk mendorong pertumbuhan Infrastruktur masih di dominasi dari DAK Fisik dan Dana Desa. Yang pada tahun 2019 Alokasi DAK Fisik secara keseluruhan sebesar Rp.1,227,281,703,000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.467,625,111,000 atau sebesar 38%,namun pada kenyataannya hal ini tidak mampu mengerem angka kemiskinan yang masih sangat tinggi 15,41% di atas angka nasional, kendatipun demikian Kebijakan Fiskal di Provinsi Bengkulu dalam

Provinsi Bengkulu sangat tergantung kepada dana Transfer ke Daerah, PAD masih minim dan Pengeluaran Pemerintah masih didominasi oleh Belanja Pegawai

bentuk Transfer Ke Daerah, mampu mendorong Kinerja Provinsi Bengkulu dari Akhir Tahun 2018 sebesar 4,99% tumbuh periode Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan kisaran mencapai 5,01% dan memasuki Triwulan II Tahun Anggaran 2019 kemabali mengalami pertumbuhan Positif dengan kisaran mencapai 5,2%. Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk Perkiraan Inflasi mengalami kenaikan dari Triwulan II 2019 sebesar 2,35% di triwulan I menjadi 3,5% di Triwulan II berdasarkan Kajian Ekonomi Regional hal ini disebabkan adanya kebutuhan yang meningkat menghadapi bulan puasa dan Menjelang ledul Fitri.

B. SEKTOR UNGGULAN PROVINSI BENGKULU

Sektor yang yang memiliki Peran signifikan dalam pertumbuhan Ekonomi Bengkulu, beasal dari Pertanian, Subsektor Tanaman Perkebunan,subsektor Perternakan,Subsektor Kehutanan.,subsektor Kehutanan, subsektor Perikanan.

1. Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Subsektor tanaman bahan makanan menjadi basis di Kabupaten RejangLebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, dari tahun 2014 hingga

tahun 2015, diketahui baik luas panen ataupun produksi dari komoditas penghasil tanaman bahan makanan di tiap-tiap kabupaten/kota tersebut terus mengalami peningkatan

2. Subsektor Tanaman Perkebunan

Subsektor tanaman perkebunan menjadi basis di Kota Bengkulu, Kab. Kaur, Kab. Mukomuko dan Kab. Bengkulu Tengah. Diketahui bahwa komoditas seperti kelapa sawit dan karet masih mendominasi baik dalam segi luas lahan panen ataupun produksinya. Hal tersebut didukung pula oleh keberadaan pabrik-pabrik pengolah kelapa sawit dan karet (baik swasta ataupun pemerintah) di sekitar kab/kota tersebut

3. Subsektor Peternakan

Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya menjadi basis di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Berkembangnya populasi dan meningkatnya produksi hasil ternak (baik ternak besar, ternak kecil dan unggas) di kelima kabupaten/kota tersebut ditengarai oleh tingginya permintaan daging dan telur mengingat cepatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut didukung pula oleh ketersediaan lahan peternakan yang luas dan ketersediaan pangan yang juga cukup berlimpah di kabupaten/kota tersebut.

4. Subsektor Kehutanan

Subsektor kehutanan menjadi basis di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut didukung oleh luasnya lahan hutan (baik hutan produksi terbatas maupun hutan produksi tetap) dan terdapatnya produksi hasil hutan terutama kayu (kayu bulat ataupun kayu gergajian).

5. Subsektor Perikanan

Subsektor perikanan menjadi basis di Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Mukomuko, Kab. Lebong dan Kab. Kepahiang dikarenakan cukup tingginya produksi dan cukup banyaknya rumah tangga dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan laut ataupun perikanan darat di kabupaten/kota tersebut.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik (D.h. P. Natadirja No. 271) Km. 8 Bengkulu
Telp. (0736) 345237 – 343082 Fax. (0736) 345311

NOTA DINAS
No. ND-013 /WPB.09/BD.03/2019


Yth : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Dari : Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Hal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan I TA. 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I TA. 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan KFR Triwulan I TA. 2019 telah diselesaikan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari publikasi resmi dan data masukan dari berbagai sumber antara lain Pemerintah Daerah, BPS, Ditjen Perimbangan Keuangan, Data Internal (Aplikasi Om SPAN dan LRA GFS Triwulan I Tahun 2019);
2. Standar dan sistematika penyusunan KFR Triwulan I TA. 2019 dimaksud mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur PA paling lambat tanggal 15 Mei 2019;
3. Laporan KFR Triwulan I TA. 2019 disusun oleh Tim yang terdiri dari Para Kepala Seksi dan pelaksana dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Bab I Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional oleh Arwin Fathurrahman
 - b. Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN oleh Rikki Okto Saputra
 - c. Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD oleh Hermono
 - d. Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD) oleh Hermono
 - e. Bab V Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih oleh Dagri Meifardo
 - f. Supporting data dan kelengkapan lainnya oleh Eko Siyam Budiyanto dan Yunisah.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila Bapak tidak berpendapat lain terlampir konsep/net Laporan KFR Triwulan I TA. 2019 beserta surat penyampaiannya.

Demikian disampaikan, mohon untuk ditetapkan.

Kabid PPA II



Abdullah